Pemerintah Susun Aturan Ekonomi Digital ASEAN

Tanggal	: Selasa , 24 Agustus 2021
Media	: Kontan Harian
Halaman	: 14
Wartawan	: Ratih Waseso Aji
Muatan Berita	: Netral
Narasumber	: Muhammad Lutfi *(Menteri Perdagangan)*
Rubrik	: Nasional
Topik	: Ekonomi Digital

Pemerintah Susun Aturan Ekonomi Digital ASEAN

JAKARTA. Pemerintah sudah meneken persetujuan ASEAN Agreement on Electronic Commerce pada 22 Januari 2019. Selanjutnya persetujuan tersebut harus diratifikasi oleh DPR sehingga menjadi Undang Undang.

Saat ini Rancangan Undang Undang (RUU) Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik itu tengah proses pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pembahasan beleid ini baru akan pemerintah lakukan bersama DPR mulai minggu depan.

Untuk mengoptimalkan aturan tersebut, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sudah menyiapkan sejumlah instrumen hukum terkait perdagangan melalui sistem elektronik. Ada undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan menteri diberbagai bidang, termasuk perlindungan konsumen, informasi dan transaksi elektronik, perizinan dan pengawasan serta pelaku usaha dalam perdagangan melalui elektronik.

Lutfi mengungkap, pemerintah juga tengah merevisi sejumlah aturan terkait *e-commerce* yang akan mencegah praktik *predatory pricing* ke dalam peta jalan pengembangan ekonomi digital di Indonesia. "Ini di bawah Kemenko Perekonomian," kata Lutfi saat rapat dengar pendapatan dengan Komisi VI, DPR, Senin (23/8).

Ratih Waseso Aji